

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Literatur

Pada bagian ini penulis akan meninjau beberapa sumber literatur pendukung yang akan di gunakan sebagai pedoman atau referensi penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul *UPAYA PEMERINTAH UNI EMIRAT ARAB DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL DI KAWASAN TIMUR TENGAH MELALUI DEKLARASI ABRAHAM ACCORDS*. Literatur yang digunakan sebagai pendukung serta penunjang penelitian ini tentunya merupakan literatur yang relevan terkait topik serta pembahasan yang akan pada penelitian ini yaitu mengenai normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Uni Emirat Arab terhadap Israel sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional Uni Emirat Arab.

Di dalam bagian ‘Tinjauan Literatur’ Penulis akan meninjau persamaan serta perbedaan antara isi pembahasan yang terdapat di dalam jurnal pembanding dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga akan mencari *gap* atas topik yang dibahas di dalam literatur pembanding dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut merupakan tinjauan literatur yang dibuat sebagai pembanding dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	ANALISIS KEPENTINGAN NASIONAL UNI EMIRAT ARAB MELAKUKAN PROSES NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN	Samsul Ma Arif dan Ali Noer Zaman	Persamaan yang dimiliki oleh jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama- sama membahas mengenai	Hal yang menjadi pembeda antara jurnal ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah jurnal ini tidak membahas secara spesifik mengenai faktor

	ISRAEL 2020		normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dengan negara Israel melalui deklarasi <i>Abraham Accords</i> .	stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah yang menjadi pertimbangan Uni Emirat Arab ketika menandatangani deklarasi <i>Abraham Accords</i> .
2	<i>Regional power United Arab Emirates: Abu Dhabi is no longer Saudi Arabia's junior partner</i>	Guido Steinberg	Jurnal ini membahas mengenai perubahan arah kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab di Timur Tengah, khususnya dinamika politik dengan Arab Saudi. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Uni Emirat Arab tidak lagi menjadi 'anak' dari Arab Saudi dilihat dari arah	Penelitian ini akan membahas dampak dari kebijakan Pemerintah dalam rangka normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel terhadap dinamika politik Uni Emirat Arab di Timur Tengah, bukan hanya dengan Arab Saudi saja.

			kebijakan luar negerinya.	
3	<i>Normalisation and Realignment in the Middle East: a new, conflict-prone regional order takes shape</i>	Muriel Asseburg dan Sarah Ch. Henkel	Kesamaan yang dimiliki antara jurnal ini dan penelitian yang penulis akan lakukan adalah membahas mengenai bagaimana normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan negara Arab berpengaruh terhadap dinamika politik di Timur Tengah.	Penelitian ini akan secara spesifik menganalisis bagaimana normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab dapat menguntungkan bagi Uni Emirat Arab khususnya pada sektor keamanan.
4	Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab – Israel: Analisis Rasionalitas Kebijakan Politik Luar Negeri Uni Emirat	Sidiq Ahmadi dan Jasmine Armantyas Safannah Bumi	Jurnal ini sama-sama membahas mengenai bagaimana normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat	Yang menjadi pembeda adalah tidak adanya bahasan mengenai upaya Pemerintah Uni Emirat Arab dalam menanggulangi kekuatan Iran dan

	Arab		Arab dapat membawa keuntungan bagi Uni Emirat Arab.	menjaga stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah pada jurnal tersebut.
5	<i>Contemporary Shifts in UAE Foreign Policy: From the Liberation of Kuwait to the Abraham Accords</i>	Ebtesam Al Ketbi	Kesamaan yang dimiliki oleh jurnal ini dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada bahasan tentang adanya perubahan arah kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab dari <i>soft power</i> menjadi <i>smart power</i> yang berdampak pula pada perubahan <i>partnership</i> dan <i>alliance</i> .	Perbedaannya terletak pada logika berpikir yang digunakan pada jurnal tersebut dengan penelitian ini. Di mana pada jurnal tersebut membahas bagaimana dinamika politik di Timur Tengah berpengaruh terhadap arah kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab, sedangkan pada penelitian ini nantinya akan membahas bagaimana arah kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab dapat memengaruhi dinamika politik

				di Timur Tengah.
--	--	--	--	------------------

Literatur pertama yang berjudul *Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Melakukan Proses Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel 2020* tulisan Samsul Ma'arif dan Ali Noer menjelaskan tentang bagaimana Uni Emirat Arab memilih jalan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan negara Israel sebagai upaya untuk memenuhi *national interest* negaranya. Pada jurnal tersebut disebutkan bahwa normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara ini terjadi pada tahun 2020 di Amerika Serikat yang dinamakan *Abraham Accords*. Samsul Ma'arif dan Ali Noer juga menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi tidak lepas dari peranan Amerika Serikat sebagai mediator atau penengah di antara kedua negara. Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Wojciech Michnik ke dalam sebuah jurnal yang berjudul *Great Power Rivalry in the Middle East* bahwa dinamika politik di Timur Tengah sudah mengalami pergeseran, kekuatan besar di Timur Tengah tidak lagi hanya dipegang oleh Amerika Serikat saja, melainkan timbul dua kekuatan baru yaitu Rusia dan Cina. Wojciech juga merujuk pada strategi keamanan nasional Amerika Serikat tahun 2017 yang dibuat pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump yang mengatakan bahwa keberadaan Amerika Serikat di Timur Tengah telah ditantang oleh dua kekuatan baru yaitu Cina dan Rusia yang berpotensi mengganggu kepentingan dan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah (Michnik, 2021). Sehingga Amerika Serikat membutuhkan aliansi baru di Timur Tengah untuk memperkuat pengaruhnya di regional tersebut.

Secara lebih lanjut, jurnal ini juga membahas mengenai alasan-alasan yang dimiliki oleh Pemerintah Uni Emirat Arab dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, yang mana hal tersebut merupakan hal yang berlawanan dengan prinsip negara Arab lain yang justru malah membatasi hubungan diplomatik dengan Israel. Dijelaskan bahwa beberapa pertimbangan utama Pemerintah Uni Emirat Arab adalah geopolitik dan ekonomi yang merupakan strategi utama Pemerintah Uni Emirat Arab dalam membangun kekuatannya baik itu di regional maupun global. Secara umum, jurnal yang berjudul *Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Melakukan Proses*

*Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel 2020* membahas mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya normalisasi hubungan diplomatik ini terhadap negara tetangga yang kemudian berpengaruh terhadap dinamika politik di kawasan Timur Tengah.

Literatur kedua yang berjudul *Regional power United Arab Emirates: Abu Dhabi is no longer Saudi Arabia's junior partner* yang ditulis oleh Guido Steinberg membahas tentang bagaimana Uni Emirat Arab di era saat ini tidak lagi berada di bawah bayang-bayang Arab Saudi (Steinberg, 2020). Berkat perubahan arah kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab yang cenderung ingin mencapai independensi dan terlepas dari pengaruh kebijakan Arab Saudi. Hal inilah yang kemudian membuat Pemerintah Uni Emirat Arab kemudian mencari aliansi baru yang memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan pengaruh Arab Saudi di Timur Tengah. Maka tidak mengherankan apabila Pemerintah Uni Emirat Arab kemudian memilih untuk melakukan normalisasi hubungan diplomasi dengan Israel yang tentu saja terdapat bayang-bayang Amerika Serikat di dalamnya.

Menurut Steinberg, hal ini terjadi tidak lepas dari pengaruh gaya kepemimpinan Mohammed bin Zayed yang memiliki latar belakang militer. Oleh karenanya sejak pertengahan tahun 2000-an Mohammed bin Zayed telah mengambil alih tanggung jawab atas setiap kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab, begitu pula dengan sektor keamanan negara tersebut. Maka tidak heran jika hingga kini Pemerintah Uni Emirat Arab sedang fokus untuk memperkuat geopolitiknya guna menjadi kekuatan besar di regional (Arif & Zaman, 2023). Selain itu, Steinberg juga menekankan bahwa pembuatan kebijakan, diversifikasi ekonomi, dan penguatan militer menjadi strategi utama Pemerintah Uni Emirat Arab dalam upaya membentuk kemandirian dan menjadi kekuatan regional (Steinberg, 2020). Secara umum, *Regional power United Arab Emirates: Abu Dhabi is no longer Saudi Arabia's junior partner* menjelaskan secara lugas bahwa Uni Emirat Arab di era sekarang ini sudah menjadi sebuah kekuatan baru di kawasan Timur Tengah melalui peningkatan aspek geopolitik, keamanan, energi, ekonomi, dan diplomasi kawasan.

Literatur selanjutnya yang berjudul *Normalisation and Realignment in the Middle East: a new, conflict-prone regional order takes shape* ditulis oleh Muriel Asseburg dan Sarah Ch. Henkel membahas tentang analisis pergeseran kebijakan luar negeri negara-negara di Timur Tengah khususnya negara Arab yang mulai melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Asseburg dan Henkel melihat bahwa fenomena ini terjadi akibat beberapa faktor yang mendorong negara-negara Arab untuk merubah kebijakan luar negerinya. Masih sama dengan literatur-literatur sebelumnya bahwa faktor utamanya adalah seputar geopolitik, ekonomi, dan stabilitas kawasan. Namun, pada jurnal ini, penulis berfokus pada aspek geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah sebagai salah satu kawasan yang saat ini dinamika politiknya yang masih belum stabil dan rawan akan terjadinya konflik membuat negara-negara yang ada di kawasan tersebut terus melakukan *realignment* terhadap kebijakan luar negerinya. Termasuk dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik untuk membentuk aliansi baru (Asseburg & Henkel, 2021).

Salah satu negara Arab yang pertama kali melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan negara Israel adalah Uni Emirat Arab. Dibantu oleh Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan Israel berhasil membentuk sebuah deklarasi kerja sama yang bernama *Abraham Accords*. Sama seperti apa yang dikemukakan oleh Asseburg dan Henkel, bahwa motivasi utama Uni Emirat Arab berani melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel adalah untuk memperkuat posisi negara ini di kawasan Timur Tengah. Meskipun mendapat kecaman dari negara Arab, mengingat secara historis negara Arab dan Israel memiliki hubungan buruk bahkan hingga saat ini. Namun Uni Emirat Arab nampaknya melihat Israel sebagai partner yang tepat dilihat dari aspek peningkatan keamanan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Asseburg dan Henkel yang mengatakan bahwa salah satu faktor penting dalam proses normalisasi mencakup keamanan dan kepentingan ekonomi (Asseburg & Henkel, 2021). Serta berubahnya persepsi terhadap Israel bagi sebagian negara Arab.

Dalam studi kasus normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dengan Israel, keputusan Pemerintah Mohammed Bin Zayed dalam membuat kebijakan tersebut tidak terlepas dari beberapa pertimbangan secara

rasional. Hal inilah yang kemudian dibahas di dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Sidiq Ahmadi dan Jasmine Armantyuas Safannah Bumi dalam tulisannya yang berjudul Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab – Israel: Analisis Rasionalitas Kebijakan Luar Negeri Uni Emirat Arab. Ahmadi dan Safannah menjabarkan apakah kebijakan Pemerintah Uni Emirat Arab dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dikeluarkan dilakukan dengan mempertimbangkan rasionalitas yang dapat menguntungkan negara Uni Emirat Arab. Sang penulis jurnal menggunakan model analisis pengambilan kebijakan yang ditulis di dalam buku yang berjudul *Essence of Decision: Explaining the Cuban missile Crisis* karya Graham T. Allison. Di mana Allison menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan melewati beberapa tahap: *goals and objectives, alternatives, consequences, dan choice* (Allison, 1971).

Dalam menganalisis keempat tahapan tersebut, penulis jurnal ini mengkaitkannya dengan kepentingan politik luar negeri Uni Emirat Arab yang dibagi menjadi tiga sektor, yaitu kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik internasional. Dari sektor keamanan, khususnya di kawasan Timur Tengah, konflik yang terjadi antara Uni Emirat Arab dan Iran menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Uni Emirat Arab. Ancaman militer dan gerakan politik Islam dari negara Iran membuat Uni Emirat Arab membutuhkan aliansi yang kuat untuk meningkatkan kapasitas militer yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan negara. Pada sektor Ekonomi, Uni Emirat Arab dihadapkan dengan masalah perbandingan antara jumlah penduduk asli negara Uni Emirat dengan pendatang dari luar negeri yang tidak sebanding. Artinya jumlah warga negara Uni Emirat Arab yang lebih sedikit perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Pemilihan Israel sebagai *partner* oleh Pemerintah Uni Emirat Arab karena tingkat perekonomian dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Israel adalah salah satu yang terbaik di kawasan (Ahmadi & Bumi, 2022). Terakhir adalah kepentingan politik internasional Uni Emirat Arab, pada Pemerintahan Mohammed Bin Zayed, dirinya memiliki keinginan untruk menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara adidaya di Timur Tengah. Hal yang ditekankan oleh MBZ adalah keinginannya untuk terlepas dari ketergantungan Arab Saudi. Langkah yang dilakukannya adalah dengan meningkatkan kapasitas



militer serta lokalisasi industri pertahanan. Maka dari itu, Israel dengan Amerika Serikat sebagai pendukung dibelakangnya dirasa mampu untuk memenuhi ambisi Mohammed Bin Zayed (Ahmadi & Bumi, 2022).

Pada Literatur yang kelima, yaitu sebuah jurnal yang berjudul *Contemporary Shift Foreign Policy: From the Liberation of Kuwait to the Abraham Accords* ditulis oleh Ebstam Al Ketbi membahas mengenai bagaimana proyeksi kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab telah mengalami *shifting* dari *gulf war* menjadi *Abraham Accords*. Ketbi menjelaskan bahwa hal inilah yang kemudian mengubah prioritas diplomasi Uni Emirat Arab, aliansi, serta strategi Pemerintah Uni Emirat Arab dalam mencapai kepentingan nasionalnya di kawasan maupun global. Bicara mengenai kepentingan nasional, literatur ini juga menggambarkan bahwa Pemerintah Uni Emirat Arab telah memulai untuk menggunakan *smart power* sebagai strategi Pemerintah di dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan menggabungkan antara *soft power* dan *hard power* sesuai pada porsinya, Pemerintah Uni Emirat Arab percaya bahwa strategi ini mampu membawa Uni Emirat Arab menjadi negara yang mandiri dan kuat di kawasan.

## **2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual**

Kerangka teori atau kerangka konseptual merupakan sebuah landasan fundamental yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis suatu permasalahan tertentu. Penggunaan kerangka teoritis atau kerangka konseptual disesuaikan dengan permasalahan yang akan dianalisis oleh peneliti. Tujuan dari penggunaan kerangka teoritis ini adalah untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang digunakan di dalam sebuah penelitian untuk mempermudah penulis dalam menganalisis korelasi antar variabel. Maka dari itu, penelitian yang berjudul *UPAYA PEMERINTAH UNI EMIRAT ARAB DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL DI KAWASAN TIMUR TENGAH MELALUI DEKLARASI ABRAHAM ACCORDS* ini akan menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut.

### 2.2.1 Neorealisme

Neorealisme merupakan sebuah *grand theory* di dalam studi Ilmu Hubungan Internasional yang keberadaannya telah lama berkembang di tengah penstudi Ilmu Hubungan Internasional. Neorealisme menekankan bahwa aktor utama di dalam sistem internasional adalah negara, sejalan dengan pendapat Mearsheimer yang menyatakan bahwa dinamika hubungan internasional dipengaruhi oleh keberadaan negara sebagai aktor yang dominan. Dalam hal ini aktor yang disoroti di dalam penelitian ini adalah Uni Emirat Arab dan Israel dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik yang dinamai deklarasi *Abraham Accords*. Kemudian Dugis menjelaskan bahwa asumsi lain yang ditekankan di dalam teori neorealisme adalah bagaimana teori ini menjelaskan bahwa perilaku sebuah negara dipengaruhi oleh kondisi sistemik dan struktural (Dugis, 2016). Menurut Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics* (1978) menjelaskan bahwa perilaku sebuah negara didorong oleh ketiadaan otoritas tertinggi di dalam struktur sistem internasional (sistem internasional anarki).

Struktur sistem internasional yang anarki inilah kemudian memaksa sebuah negara untuk untuk menolong dirinya sendiri agar bisa bertahan hidup di tengah struktur sistem internasional yang anarki. Menurut Waltz, tindakan yang bisa dilakukan untuk menjamin keberlangsungan hidup negaranya yaitu melalui peningkatan keamanan negaranya sendiri. Hal ini yang kemudian dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan melakukan kerja sama di sektor keamanan dengan Israel untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya. Sehubungan dengan upaya negara dalam mempertahankan hidupnya ditengah struktur internasional yang anarki, biasanya negara yang lebih lemah akan melakukan aliansi (*bandwagoning*) dengan negara kuat ketika muncul potensi ancaman (Dugis, 2016). Langkah inilah yang kemudian diambil oleh Uni Emirat Arab pada saat melakukan aliansi dengan Israel ketika Iran sedang mengalami kemajuan pesat pada pengembangan Uni Emirat Arab karena hanya Israel yang sudah memiliki senjata nuklir di kawasan Timur Tengah.

### 2.2.2 Kepentingan Nasional

Berkaitan dengan penggunaan paradigma neorealisme dalam memandang upaya Pemerintah Uni Emirat Arab dalam mencapai kepentingan nasionalnya di kawasan Timur Tengah, maka penulis juga menggunakan konsep kepentingan nasional untuk menganalisis seberapa besar dampak yang diberikan dari adanya deklarasi *Abraham Accords* ini terhadap upaya Pemerintah Uni Emirat Arab dalam kapasitas pertahanannya serta turut serta dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Secara umum, Martha Finnemore dalam bukunya yang berjudul *National Interest In International Society* (1996) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai suatu tujuan yang dimiliki oleh suatu negara dan yang dipengaruhi oleh norma-norma, institusi, dan interaksi sosial dalam masyarakat internasional (Finnemore, 1996). Kepentingan nasional juga biasanya menjadi pemicu bagi sebuah negara dalam berinteraksi di tengah masyarakat internasional. Oleh karenanya, Finnemore juga menganggap bahwa kepentingan nasional tidaklah bersifat tetap atau baku, melainkan merupakan hasil dari proses yang kompleks. Karena kepentingan nasional adalah sesuatu yang dikonstruksi oleh aktor-aktor untuk mendapatkan keuntungan dari interaksi yang dilakukan dengan aktor lainnya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang ditekankan oleh Martha Finnemore bahwa kepentingan nasional itu ada karena dikonstruksi bukan sesuatu yang sifatnya “given”.

Melihat lebih dalam mengenai definisi konsep kepentingan dalam paradigma neorealis, kepentingan nasional akan selalu dikaitkan dengan *pursuit of power* atau keinginan negara untuk mendapatkan *power* dan pengaruh sebanyak-banyaknya ditengah tatanan sistem internasional yang anarki ini. Menurut Mearsheimer dalam bukunya *The Tragedy of Great Power Politic* (2001) menjelaskan terdapat tiga alasan mengapa negara begitu terobsesi untuk mengejar *power*, di antaranya:

- 1) Sistem internasional yang anarki menyebabkan ketiadaan pemegang otoritas yang lebih tinggi atas negara yang dapat melindungi negara-negara di sistem internasional;
- 2) Kemampuan militer yang dimiliki oleh suatu negara;

- 3) Ketidakpastian intensi yang dimiliki oleh satu negara terhadap negara lainnya menyebabkan kekhawatiran akan datangnya ancaman dari luar. Sehingga semakin besar *power* dan pengaruh yang dimiliki, maka semakin besar pula *chance of survival* yang dimiliki oleh negara tersebut (Mearshimer, 2001).

Pada penelitian ini, penulis lebih berfokus kepada kepentingan nasional yang dibawa oleh Pemerintah Uni Emirat Arab di dalam deklarasi *Abraham Accords*. Sebagai salah satu negara Arab yang besar di Timur Tengah, Uni Emirat Arab jelas memiliki kepentingan nasionalnya sendiri khususnya dalam segi keamanan. Pada segi keamanan, kepentingan nasional Uni Emirat Arab terkonstruksi akibat adanya pengembangan program nuklir Iran dan adanya radikalisme islam di tingkat regional (Arif & Zaman, 2023). Uni Emirat Arab dan Israel sama-sama khawatir akan adanya dua hal tersebut, karena ditakutkan akan mengancam stabilitas keamanan dan politik di Timur Tengah. Bagi Uni Emirat Arab, pengembangan senjata nuklir oleh Iran dapat mengancam kedaulatan wilayahnya, sedangkan bagi Israel pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran dapat mengancam kekuatan sekutunya di kawasan Timur Tengah.

### **2.3 Asumsi Penelitian**

1. Penulis berasumsi bahwa setelah adanya deklarasi *Abraham Accords*, hubungan antara Uni Emirat Arab-Israel menjadi semakin baik;
2. Penulis berasumsi bahwa kerja sama pada sektor keamanan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab terhadap Israel pasca deklarasi *Abraham Accords* dapat membantu mengembangkan kapasitas pertahanan Uni Emirat Arab;
3. Penulis berasumsi bahwa dengan adanya deklarasi *Abraham Accords* ini mampu membuat keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi lebih stabil.

## 2.4 Kerangka Analisis

